

## KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Semua Selesai Sebelum 20 Maret

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024. KPU punya 35 hari untuk mengumumkan hasil pemilu 2024 setelah hari pengumuman suara.

"Kalau target kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret, karena kan kami juga pantau yang ada di bawah ya," kata komisioner KPU August Mellaz kepada wartawan di Jakarta Pusat Jakarta, Rabu (13/3).

Dia menjelaskan, pihaknya juga memantau rekapitulasi berjenjang di tingkat Provinsi yang mayoritas telah selesai. Tinggal dilanjutkan rekapitulasi di tingkat nasional yang diselenggarakan di kantor KPU RI Jakarta Pusat.

"Karena ini hasil pantauan kami juga, rekapitulasi yang dilakukan teman-teman di

provinsi, dan relatif kan semua sudah di bagian akhir. Tinggal nanti begitu selesai kita jadwalkan untuk rekapitulasi di nasional," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini, KPU telah mengesahkan 16 dari 38 provinsi. Rapat pleno terbuka atau rekapitulasi tingkat nasional rencana akan dilaksanakan dengan dua panel.

Pada hari ini, KPU rencana akan membacakan rekapitulasi 3 provinsi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Jawa Timur.

"Hari ini sesuai dengan jadwal, ada dua panel pelaksanaan rekapitulasi terbuka untuk tingkat nasional, di panel A ada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dan Jawa Timur," sambungnya. ● mei

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



## SIDANG PERDANA PPL KUALA LUMPUR

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data DPT di Kuala Lumpur, Malaysia di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (13/3). JPU Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di KL, Malaysia.



FOTO: ANT

## SIDANG EKSEPSI SYAHRUL YASIN LIMPO

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/3). Dalam pembacaan eksepsi yang disampaikan Syahrul melalui tim penasihat hukumnya, terdakwa meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari tahanan dengan alasan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa KPK tidak cermat, jelas, dan lengkap.

## KPK Periksa Hengki yang Diduga Jadi "Otak" Pungli di Rutan KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Hengki, sosok yang diduga sebagai "otak" pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan lembaga antirasuah.

Hengki merupakan mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban Rumah Tahanan (Kamtib Rutan) KPK periode 2018-2022. Saat itu, Hengki merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) di KPK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Hengki diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan terhadap tersangka korupsi di lingkungan Rutan KPK, Rabu (13/3).

"Hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK," kata Ali kepada wartawan, Rabu (13/3).

Selain Hengki, penyidik KPK juga memanggil Kepala Rutan KPK periode 2022 sampai sekarang bernama Achmad Fauzi. Lalu, petugas bagian pengamanan Rutan KPK Deden Rochendi, staf cabang Rutan KPK Agung Nugroho, dan petugas rutan KPK Ari Rahman Hakim.

Ketiganya merupakan PNYD dari instansi lain di KPK. Kemudian, ASN

Kemenkumham selaku staf Rutan KPK tahun 2018 Eri Angga Perdana, pengamanan Rutan KPK Mahdi Aris, dan pengamanan Rutan KPK Muhammad Abdul.

Sebelumnya, dalam sidang etik kasus pungli di rutan Kpk, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Hengki merupakan sosok yang membangun sistem pungli di KPK. Ia membuat praktik pungli kepada tahanan korupsi itu menjadi terstruktur.

Tidak hanya itu, Hengki juga menentukan tarif penyelundupan ponsel ke dalam rutan dengan nilai Rp 20 juta hingga Rp 30 juta sekali masuk.

"Begitu juga setor-setor setiap bulan Rp 5 juta, supaya bebas menggunakan HP," kata Tumpak di kantornya, Kamis (15/2) lalu.

Kasus dugaan pemerasan di Rutan KPK itu ditangani dari tiga sisi yakni, etik, disiplin, dan pidana. Dalam perkara pidananya, KPK telah menetapkan belasan tersangka termasuk Hengki. Saat ini, Hengki tidak lagi di Kemenkumham. Ia bekerja di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. ● han

# Wacana TNI dan Polri Duduki Jabatan ASN Dianggap Menyalahi Fungsi dan Kompetensi

Salah satu amanat reformasi adalah mengembalikan fungsi TNI dan Polri menjadi militer dan aparat penegak hukum yang profesional.

JAKARTA (IM) - Wacana pemerintah melibatkan anggota TNI-Polri aktif untuk mengisi jabatan aparat

sipil negara (ASN) dinilai menyalahi fungsi dan kompetensi kedua lembaga itu. Peneliti senior Imparsial

Al Araf, mengatakan, TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas menghadapi ancaman perang. Sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan penegakan hukum.

"Kedua lembaga itu sepatutnya dan seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik dan menduduki jabatan-

jabatan sipil karena itu bukan fungsi dan kompetensinya," kata Al Araf saat dihubungi, Rabu (13/3).

"Dengan demikian hal itu sesuatu yang menyalahi jati diri mereka," ujar Al Araf. "Rencana penempatan TNI dan Polri aktif dalam jabatan sipil adalah bentuk kemunduran serius dalam proses reformasi," katanya.

Al Araf menilai rencana menempatkan anggota TNI dan Polri aktif dalam jabatan sipil mencederai semangat Reformasi. Salah satu amanat Reformasi adalah mencabut peran TNI dan Polri dalam urusan politik, dan mengembalikan fungsi mereka menjadi militer dan aparat penegak hukum yang profesional. Dengan rencana penempatan PP itu maka menurut Al Araf menjadi bukti pemerintah bersikap bertolak belakang dengan semangat Reformasi.

"Seharusnya menempatkan fungsi TNI dan Polri dalam bidang pertahanan keamanan, dan bukan duduk dalam jabatan sipil," ucap Al Araf.

Al Araf khawatir jika PP disahkan maka ada kecenderungan pemerintah bersikap otoriter terhadap masyarakat sipil, yakni menghadapi kritik dengan melibatkan kekuatan

militer dan penegak hukum. Sebelumnya diberitakan, rencana penyusunan PP tentang manajemen ASN disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

"Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya," ujar Anas, dilansir siaran pers dari laman resmi Kempan RB, Selasa (12/3).

Meski demikian, Anas menegaskan aturan tersebut nantinya bersifat resiprokal (timbal balik). Kemudian juga akan mempertimbangkan seleksi secara ketat.

"Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta," kata Anas.

"Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI/Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik," katanya menambahkan.

Rancangan PP manajemen ASN berisi 22 bab yang terdiri dari 305 pasal. Rancangan PP itu ditargetkan bisa disahkan pada 30 April 2024. ● han

## Mayor Teddy Dimutasi Jadi Wadanyonif, KSAD Maruli: Masa Depan Pasti Cerah

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengapresiasi rotasi Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya yang dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Raider 328/Dirgahayu.

Menurut Maruli, promosi tersebut menunjukkan bahwa masa depan Mayor Teddy pasti cerah. "Semua lah (prospek ke depan). Kalau namanya Mayor masa depannya pasti cerah, karena masih sama-sama jalan gini kan, nanti di tengah jalan ada yang sukses ada yang ini," ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).

Promosi kali ini juga baik untuk karier Mayor Teddy. Karena dapat menambah pengalaman se-

bagai prajurit yang pernah mendampingi pejabat sipil. "Ya memang baguslah beliau ini kan sudah lama tinggal tentara, balik lagi. Bagaimana di tentara mungkin nanti diperlukan di mana lagi, sehingga nanti orang ini tahu banyak menyinkronkan segala macam bagaimana di tentara, bagaimana di kementerian gitu" jelasnya.

Selain itu, Maruli menilai Mayor Teddy juga sudah layak menjadi Wadanyonif. Ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto itu pun sudah memiliki pengalaman akademik dan pernah masuk satuan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang pernah dipimpin Maruli.

Meski tidak langsung menjadi Komandan Yonif, Maruli menyatakan akan memantau kinerja Mayor

Teddy ke depan.

"Tidak langsung komandan, Wadan dulu bisa liat liat bagus mudah-mudahan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya, dimutasi menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu. Rotasi itu tertuang dalam Keputusan Kepala Staf TNI AD (KSAD) nomor Kep 137/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Adapun Para Raider 328/Dirgahayu bermarkas di Cilodong, Depok, Jawa Barat dan berada di bawah komando Brigade Infanteri (Brigif) Para Raider 17/Divif 1/Kostrad. Teddy menggantikan posisi Mayor (Inf) Ade Fian yang mendapat promosi sebagai Perwira Seksi Operasi Divisi Infanteri (Divif) 1 Kostrad. ● mei



FOTO: ANT

## BNNP KALBAR MEMUSNAHKAN NARKOTIKA

Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto bersiap memasukkan ganja ke dalam mesin incinerator saat rilis kasus dan pemusnahan di Pontianak, Kalbar, Rabu (13/3). BNNP Kalbar, memusnahkan barang bukti hasil sitaan dari tiga kasus tindak pidana narkotika yang berbeda yaitu berupa 1,8 kg ganja, satu kg sabu dan 12 butir ekstasi, serta menangkap tiga pelaku di Pontianak, Mempawah dan Ketapang.

## Rumah di Bogor Dibobol Maling Saat Pemiliknya Sholat Tarawih

BOGOR (IM) - Rumah warga di Kampung Cimanggis Pabuaran, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dibobol maling saat penghuni rumah sedang Sholat Tarawih. Menurut korban, Beni, aksi pencurian di rumahnya

itu terjadi pada Selasa 13 Maret 2024 malam. Ketika itu, dirinya dan keluarganya pergi Sholat Tarawih. "Terawih semua, berangkat semua keluarga," kata Beni kepada wartawan, Rabu (13/3). Saat pulang ke rumah

sekitar pukul 20.30 WIB, Beni mendapati pintu rumah sudah dalam kondisi terbuka. Di dalam rumah kondisinya juga berantakan.

"Berantakan semua rumah lemari, pakaian dikeluarkan semua," ungkapnya. Diduga, kawatan maling

masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu belakang. Adapun barang berharga miliknya yang hilang yakni 3 unit handphone dan uang tunai kurang lebih Rp1,5 juta.

"Alhamdulillah motor aman 2, kunci masih nge-

gantung," tambahnya.

Dalam kejadian ini, Beni memilih tidak melapor kepada pihak kepolisian karena menerimanya sebagai musibah dan berharap tidak kembali terjadi.

"Eenggak, saya gak lapor. Musibah aja," ujarnya. ● mei

### PENGUMUMAN

Bahwa PT INDO SAMUDRA MARITIM, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut **PERSEORAAN**), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa:

PT INDO SAMUDRA MARITIM tersebut akan melakukan pelepasan sebanyak-banyaknya 100% saham dalam perseroan (akuisisi) kepada pihak ketiga.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

**PT INDO SAMUDRA MARITIM**  
GHJ Suite Lt6, Jl. Tanah Abang III No. 18,  
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat  
10160

Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 14 Maret 2024  
Direksi,  
ttd